

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia kini adalah negara dengan sistem demokrasi baru yang bersemangat, dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, dengan adanya keterbukaan sosial dan ruang bagi debat publik yang jauh lebih besar. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (dalam Undang-Undang Dan Perppu, Pilkada Dan Pemda:2014)

Otonomi daerah diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah harus berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada. Keadaan yang ada itu meliputi modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan

sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. (dalam Adisasmita, 2006:45)

Sesuai dengan salah satu tujuan desentralisasi yaitu tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan merupakan dambaan bagi setiap individu, kesejahteraan berarti manusia sudah berada pada kondisi baik, makmur, dalam artian mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan sangat berhubungan erat dengan berbagai macam aspek, termasuk ekonomi, social, hukum, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, hubungan antara aspek ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan aspek sosial. Jika pertumbuhan ekonomi baik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks, dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani, kehidupan secara bermartabat.

Faktor penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita (dalam Aneta 2014:106-107) menyebutkan beberapa factor penyebab kemiskinan, diantaranya:

1) Rendahnya taraf pendidikan, taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki, 2) Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya fikir, dan rendahnya

prakarsa, 3) terbatasnya lapangan kerja, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan, 4) Kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, ini sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pada pasal 19 tentang penanggulangan kemiskinan dijelaskan bahwa, “ Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini.

Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun kedua hal tersebut tidak

memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya penerima bantuan tersebut dan tidak maksimalnya pendataan dimana, siapa yang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut, selanjutnya juga bagi yang menerima dan memegang kartu jaminan kesehatan atau Jamkesmas tersebut, kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus atau mendapat pelayanan dan perawatan yang maksimal dari pihak rumah sakit.

Kriteria miskin menurut standar BPS adalah; 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang. 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah. 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual

dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dinyatakan miskin.  
([http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-](http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps)  
menurut-standar-bps. Online. diakses, 07/07/2015)

Data yang diperoleh dari Desa Tabulo menyatakan bahwa angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2010 – 2014 itu mengalami perubahan pada tahun 2010 angka kemiskinan 115 dan pada tahun 2011 itu angka kemiskinannya berkurang jadi 112 Kepala Keluarga dan kemudian pada tahun 2012 itu mengalami penurunan angka kemiskinan juga menjadi 91 Kepala Keluarga, hingga pada tahun 2013 dan 2014 angka kemiskinan belum berubah. Ini dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Tabulo belum efektif. Kerena setelah dianalisis kembali ternyata dari perubahan atau penurunan angka kemiskinan itu hanya statnan atau jalan ditempat dan tidak ada perubahannya.

Sesuai dengan kriteria kemiskinan standar BPS masih banyak Kepala Keluarga yang memenuhi Sembilan kriteria yang oleh BPS itu dinyatakan miskin. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari desa bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tabulo, yakni Jumlah kepala keluarga kaya itu ada 8, jumlah kepala keluarga sedang ada 123, kemudian kepala keluarga sejahtera itu 145 dan keluarga prasejahtera itu ada 132, jika dipresentasikan jumlah keluarga prasejahtera sangat mendominasi, sehingga perlu adanya program yang benar-benar menyentuh pokok dari kemiskinan tersebut.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, faktor anggaran, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan karena anggaran merupakan kebutuhan untuk menunjang pembangunan masyarakat. Jarangnya komunikasi itu dapat mempengaruhi tidak maksimalnya kebijakan yang dilaksanakan karena tidak ada sinergitas yang terbangun, adanya sumber daya yang potensial dalam suatu pemerintahan dapat diharapkan mampu untuk menjalankan proses pelaksanaan kebijakan, sikap pelaksana ini berhubungan dengan integritas yang dimiliki setiap individu yang melaksanakan suatu kebijakan yang kemudian itu tidak konsekuen dengan apa yang dilaksanakan atau acuh tak acuh dengan keadaan, dalam pelaksanaan kebijakan ketika sikap pelaksananya tidak baik maka apa yang direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu pula dengan kualitas pelayanan, kualitas adalah tolak ukur dari berhasilnya suatu proses kebijakan yang kemudian implementasinya berdampak positif terhadap masyarakat.

Dengan mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo, pemerintah daerah mempunyai Misi “Membangun Masyarakat Boalemo yang Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera” dari misi tersebut maka jelas kebijakan pemerintah daerah itu adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi dalam implementasinya itu belum maksimal karena dapat dilihat dari permasalahan yang ada di Desa Tabulo tersebut yang angka kemiskinannya tidak ada perubahan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas. Dan kemudian tidak ada berupa bentuk evaluasi yang dilakukan pada tiap tahunnya untuk bagaimana dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam pengentasan kemiskinan, sehingga proses pengentasan kemiskinan itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan masalah diatas maka pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Desa Tabulo belum maksimal, dengan demikian saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA TABULO”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Tabulo?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi tidak maksimalnya pengentasan kemiskinan di Desa Tabulo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Desa Tabulo
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Desa Tabulo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademik, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salahsatu syarat untuk mencapai puncak pada program strata 1 (SI) pendidikan kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur pengetahuan dibidang pemerintahan. Dan juga diharapkan dapat menjadi bahan dan informasi bagi pembaca.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan.